

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kansil, C.ST. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- F, Marbun S. 2013, *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press.
- F, Marbun S. 2014, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Cetakan Pertama Yogyakarta: FH UII Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Edisi Pertama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- R, Ridwan H. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemitro, Roni Hanitjo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2018. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018

Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Makalah

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

C. Jurnal

Fahmi, Wirza, Mahdi Syahbandir, Efendi. 2017. *Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. 2018. *Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Panorama Hukum.

Mufariz, Fitri Rahmadhani. 2019. *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan.

Pahlevi, Yusron. 2019. *Analisis Yuridis Pancasila Sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)*. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Malang.

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua.

E. Media Online

Tempo.co. *1.906 PNS Diberhentikan Secara tidak Hormat Karena Korupsi*. Terbit pada 13 Agustus 2019, diakses pada 4 Januari 2020.

Okezone.com. *MK Memperkuat SKB Percepatan Pemberhentian PNS yang Sudah Inkrach Kasus Tipikor*. terbit pada 27 April 2019, diakses pada 2 Mei 2020.

Tirto.id. *Kepala Daerah Diminta Pecat PNS Koruptor Tidak dengan Hormat*. Terbit pada 13 September 2018, diakses pada 2 Mei 2020.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS

G. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang Nomor
28/G/2018/PTUN.PDG.